



Tugas Bhabinkamtibmas? Implementasi Kebijakan Kamtibmas dalam Menangani Konflik Pedagang di Desa Bangsri, Sidoarjo

Fierda Nurany¹, Nourma Ulva Kumala Devi², Theressha Rosyidatul Awaliyah³, Patricia Rachel⁴, Aulya Yanuarizka⁵, Dina Faradilah⁶, Ardianto Putra⁷, Amrosi Wildan Hanani⁸

^{1,3,4,5,6,7,8}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jalan Ahmad Yani No. 115, Surabaya, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Jalan Kom L Yos Sudarso, Probolinggo, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v4i2.179>

CORRESPONDENCE

E-mail: fierdanurany@ubhara.ac.id

KEYWORDS

Implementation, Policy, Conflict, Traders, Kamtibmas

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Public Security and Order (Kamtibmas) policy in resolving traders' disputes in Bangsri Village, Sidoarjo Regency. The background of this research departs from the dynamic socio-economic conditions of the Bangsri community, especially in the trade sector, which often causes friction between traders such as stall disputes, unfair competition, and market cleanliness problems. These disputes have the potential to disrupt the stability of Kamtibmas if not handled quickly and wisely. This research uses a qualitative approach with the aim of understanding the process of policy implementation in a real social context. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies, with the main informants consisting of Bhabinkamtibmas, Kasi Trantib, RT Chair, and market traders. The results of the study show that the implementation of the Kamtibmas policy in Bangsri Village has gone quite well, especially from the communication aspect which is the most dominant factor in determining the success of the policy implementation. Fast and transparent two-way communication has been proven to strengthen coordination between Bhabinkamtibmas, village governments, and the community. However, there are still limitations in terms of resources, executive disposition, and bureaucratic structure that are still hierarchical. The implications of this study emphasize the importance of strengthening communication across actors, increasing human resource capacity, and simplifying bureaucracy so that the handling of social conflicts at the village level can take place more effectively, responsively, and sustainably.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan elemen fundamental bagi terciptanya stabilitas sosial di tingkat lokal. Sistem Kamtibmas yang efektif menjadi landasan penting bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi yang aman dan produktif

(Wahyurudhanto, 2023). Dalam kerangka pembangunan nasional, penguatan keamanan berbasis masyarakat merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan responsivitas terhadap kebutuhan warga desa (Aguirre & Muggah, 2018). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 mempertegas peran strategis Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana pemolisian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial di tingkat desa.

Kerangka regulatif tersebut memiliki relevansi khusus dalam konteks Desa Bangsri, Kabupaten Sidoarjo, yang menunjukkan dinamika sosial ekonomi cukup intens. Aktivitas perdagangan yang menjadi pusat pergerakan ekonomi desa meningkatkan intensitas interaksi antar pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, gesekan seperti perselisihan lapak, persaingan usaha, dan ketidaktertiban area niaga kerap muncul dan berpotensi berkembang menjadi gangguan ketertiban jika tidak ditangani secara tepat. Situasi ini menuntut kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai mediator sekaligus fasilitator komunikasi yang mampu meredam potensi konflik sejak dini.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan Kamtibmas di berbagai konteks desa, seperti penguatan Satgas Keamanan Desa (Wahyudi & Wicaksono, 2023), pelaksanaan Polmas di Desa Jatikalang (Nurany et al., 2023), maupun peran Bhabinkamtibmas di berbagai wilayah (Rahanra & Kasihiuw, 2024; Syahrum, 2024). Namun, kajian tersebut belum menempatkan perselisihan pedagang sebagai bentuk konflik ekonomi-sosial yang unik sebagai fokus utama analisis. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984), sehingga evaluasi mengenai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi belum dikembangkan secara sistematis dalam konteks konflik perdagangan lokal. Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih terarah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, urgensi penelitian semakin mengemuka mengingat kompleksitas interaksi ekonomi di Desa Bangsri yang dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara tepat. Perselisihan antarpedagang tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi empiris mengenai sejauh mana implementasi kebijakan Kamtibmas telah berjalan secara efektif, terutama dalam hal komunikasi lintas aktor, dukungan sumber daya, kesiapan aparat pelaksana, serta efektivitas prosedur birokrasi yang berlaku.

Sejalan dengan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kamtibmas dalam penyelesaian perselisihan pedagang di Desa Bangsri, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan (George C. Edwards III, 1984). Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984) memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Karakteristik komunikasi menekankan kejelasan, konsistensi, dan kelancaran arus

informasi dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Karakteristik sumber daya mencakup kecukupan SDM, fasilitas, anggaran, dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Selanjutnya, disposisi pelaksana berhubungan dengan sikap, komitmen, dan motivasi aparat dalam melaksanakan kebijakan. Karakteristik terakhir, yaitu struktur birokrasi, mencakup prosedur operasional, mekanisme koordinasi, dan pembagian kewenangan yang dapat memperlancar maupun menghambat implementasi.

Dalam konteks penelitian ini, keempat karakteristik George C. Edwards III (1984) digunakan untuk menilai secara mendalam bagaimana Bhabinkamtibmas menjalankan peran dalam menangani perselisihan pedagang di Desa Bangsri. Analisis terhadap aspek komunikasi mencakup hubungan informasi antara aparat, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Aspek sumber daya dievaluasi berdasarkan ketersediaan sarana pendukung serta kemampuan teknis Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi mediasi. Disposisi pelaksana dianalisis melalui tingkat profesionalisme dan komitmen dalam penyelesaian konflik, sementara struktur birokrasi ditinjau dari efektivitas prosedur penanganan perselisihan serta koordinasi lintas aktor yang mendukung terciptanya ketertiban di desa. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan menyeluruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan Kamtibmas di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri dalam konteks sosial yang nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Instrumen wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur yang berisi pertanyaan tentang empat karakteristik implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984), seperti pola komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, serta prosedur birokrasi dalam penyelesaian konflik pedagang. Informan dipilih melalui purposive sampling atas dasar keterlibatan langsung dalam proses penanganan konflik, dengan total 10 informan, terdiri atas 1 Bhabinkamtibmas, 1 Kasi Trantib, 2 Ketua RT, dan 6 pedagang yang pernah terlibat atau terdampak perselisihan. Pemilihan pedagang juga memanfaatkan teknik snowball untuk menjangkau individu yang mengetahui secara detail proses mediasi yang berlangsung.

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data lapangan, meliputi laporan harian Bhabinkamtibmas, notulen rapat koordinasi, berita acara penyelesaian konflik, dan regulasi terkait seperti Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Desa tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al., (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik dan matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi dan penyajian data memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antaraktor, sementara proses verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi temuan dengan konteks lapangan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan Bhabinkamtibmas, aparat desa, dan

pedagang, misalnya mencocokkan klaim terkait alur mediasi dengan kesaksian pedagang serta rekaman berita acara. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung selama proses interaksi pedagang, dan dokumen resmi. Contoh verifikasi yang dilakukan adalah mencocokkan jadwal mediasi yang disampaikan informan dengan catatan resmi dalam laporan kegiatan Bhabinkamtibmas. Melalui langkah tersebut, penelitian memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki kredibilitas dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan Kamtibmas secara komprehensif dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bangsri merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang dinamis, dengan dominasi aktivitas di sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan. Letak geografis yang strategis serta aksesibilitas menuju jalur utama Sidoarjo menjadikan Bangsri sebagai simpul ekonomi masyarakat lokal. Keberadaan pasar tradisional, kios-kios permanen di sepanjang jalan utama, serta pedagang kaki lima (PKL) menciptakan ruang interaksi sosial dan ekonomi yang tinggi di antara masyarakat.

Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan potensi gesekan antar pelaku ekonomi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan beberapa jenis perselisihan yang sering terjadi di kalangan pedagang di Desa Bangsri, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Perselisihan di Kalangan Pedagang di Desa Bangsri, Sidoarjo

No.	Jenis Perselisihan	Deskripsi Permasalahan	Dampak terhadap Kamtibmas
1	Sengketa Lapak	Perselisihan terkait batas area jualan, perluasan area dagang tanpa izin, atau perebutan lokasi strategis di sekitar pasar dan jalan utama.	Menimbulkan keributan antar pedagang dan potensi bentrok fisik di area perdagangan.
2	Persaingan Tidak Sehat	Tindakan seperti banting harga secara ekstrem, penyebaran rumor negatif tentang pesaing, atau upaya menghalangi pelanggan pedagang lain.	Meningkatkan ketegangan sosial dan mengganggu suasana pasar yang kondusif.
3	Masalah Kebersihan dan Ketertiban	Penumpukan sampah, barang dagangan yang menutup akses jalan, hingga suara bising yang mengganggu pedagang dan warga sekitar.	Mengurangi kenyamanan publik, menimbulkan keluhan warga, dan menciptakan citra negatif pasar.
4	Utang Piutang Antar Pedagang	Perselisihan akibat keterlambatan atau kegagalan pembayaran transaksi dagang dan pinjaman pribadi antar pedagang.	Berpotensi memunculkan konflik interpersonal dan ketegangan sosial di lingkungan pedagang.

Sumber: Hasil penelitian, (2025)

Perselisihan semacam ini, meskipun tergolong berskala mikro, memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di tingkat lokal. Konflik yang berawal dari permasalahan sederhana, seperti perebutan lapak atau persaingan tidak sehat, dapat berkembang menjadi pertikaian terbuka apabila tidak segera diselesaikan dengan pendekatan yang tepat dan bijak. Oleh sebab itu, peran Bhabinkamtibmas Desa Bangsri menjadi sangat krusial dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan terhadap setiap bentuk gesekan sosial

yang muncul di kalangan pedagang. Dalam hal ini, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh pelaku usaha.

Analisis implementasi kebijakan Kamtibmas dalam penyelesaian perselisihan pedagang di Desa Bangsri pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984) sebagai landasan konseptual utama. Teori ini menyoroti empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *communication, resources, disposition, and bureaucratic structure*, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana keempat variabel tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan Bhabinkamtibmas dan pemerintah desa dalam menangani perselisihan pedagang secara konstruktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan Kamtibmas diimplementasikan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Desa Bangsri.

Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan, informasi, atau makna dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan membangun pemahaman bersama serta mengoordinasikan tindakan (Rogers EM. dan Shoemakers F., 1987). Dalam konteks implementasi kebijakan publik, komunikasi memiliki peran sentral untuk memastikan maksud, tujuan, dan instruksi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran (George C. Edwards III, 1984). Kejelasan dan konsistensi pesan menjadi kunci keberhasilan implementasi, sebab tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan rentan mengalami distorsi makna atau kesalahan interpretasi di tingkat pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Oleh karena itu, komunikasi dalam kebijakan publik tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian informasi satu arah, tetapi juga mencakup dialog dua arah yang memungkinkan partisipasi aktif serta umpan balik dari masyarakat (Hogwood, 1995).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT dan sejumlah pedagang di Desa Bangsri, diketahui bahwa komunikasi antara masyarakat dan aparat pelaksana kebijakan, khususnya Bhabinkamtibmas, telah berlangsung cukup intensif namun masih menghadapi beberapa kendala. Ketua RT menjelaskan bahwa laporan mengenai perselisihan antar pedagang sering kali sudah disampaikan kepada pihak desa dan Bhabinkamtibmas, tetapi respon penanganannya kerap terlambat karena jalur komunikasi dari tingkat lapangan ke Polsek atau kecamatan belum sepenuhnya efisien. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, efektivitasnya masih perlu diperkuat terutama dalam hal kecepatan, keterbukaan, serta sistem pelaporan yang lebih terintegrasi agar setiap masalah dapat segera ditangani secara tepat.

Peran Bhabinkamtibmas di Desa Bangsri memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas

bertugas membina masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta menjalin kemitraan dengan warga untuk menyelesaikan masalah sosial di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai jembatan komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat melalui berbagai bentuk interaksi, seperti sosialisasi di area pasar, penyampaian imbauan kamtibmas, hingga pemanfaatan media digital seperti grup WhatsApp komunitas pedagang. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan pengurus pasar menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan komunikasi dan memastikan pesan-pesan keamanan dapat diterima dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri telah berjalan dengan cukup baik karena melibatkan berbagai saluran komunikasi formal dan informal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek kecepatan, transparansi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar sistem komunikasi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat pedagang. Peningkatan kualitas komunikasi dua arah diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian konflik di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di desa.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. George C. Edwards III, (1984) menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia, finansial, maupun sarana pendukung. Sumber daya di sini tidak hanya mencakup kemampuan teknis aparat pelaksana, tetapi juga mencakup dukungan material, infrastruktur, serta modal sosial yang memungkinkan kebijakan berjalan secara berkelanjutan dan efektif. Dalam konteks kebijakan Kamtibmas, ketersediaan sumber daya menjadi prasyarat utama agar aparat di tingkat desa mampu menjalankan fungsi pembinaan, mediasi, dan penegakan ketertiban masyarakat secara optimal.

Hasil wawancara dengan petugas Bhabinkamtibmas dan aparat desa menunjukkan bahwa kondisi sumber daya di Desa Bangsri relatif memadai, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan. Seorang petugas Bhabinkamtibmas menyampaikan sebagai berikut:

“Kami di Bhabinkamtibmas jumlahnya terbatas, dan tidak bisa terus-menerus memantau pasar. Apalagi kalau ada perselisihan mendadak, sering tidak ada personel yang berjaga. Kami juga kurang dukungan alat komunikasi dan pelatihan soal mediasi konflik.” (wawancara dengan petugas Bhabinkamtibmas di Desa Bangsri)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kapasitas personel dan dukungan fasilitas masih menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan kegiatan Kamtibmas di lapangan. Keterbatasan jumlah anggota Linmas serta kurangnya peralatan pendukung seperti alat komunikasi dan sarana patroli menyebabkan respons terhadap gangguan keamanan sering kali tidak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada terbatasnya kemampuan aparat untuk melakukan tindakan preventif maupun mediasi secara

optimal, terutama pada saat terjadi konflik antar pedagang yang memerlukan penanganan segera.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa dari segi sumber daya manusia (SDM), Bhabinkamtibmas memiliki kemampuan komunikasi dan mediasi yang cukup baik, terutama dalam menggunakan pendekatan persuasif yang diterima masyarakat. Namun demikian, belum tersedia pelatihan formal terkait teknik resolusi konflik sosial atau negosiasi kompleks yang dapat memperkuat kapasitas profesional aparat. Dari aspek anggaran, dana operasional yang dialokasikan untuk kegiatan Kamtibmas di tingkat desa masih sangat terbatas, sehingga kegiatan preventif seperti penyuluhan atau kampanye tertib berdagang belum dapat dilakukan secara rutin. Pada sisi sarana dan prasarana, ruang mediasi yang nyaman serta fasilitas dokumentasi belum tersedia dengan baik, mengakibatkan proses penyelesaian konflik sering dilakukan di tempat umum yang kurang kondusif. Sementara itu, sumber daya sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan Bhabinkamtibmas tergolong tinggi, dan hal ini menjadi modal sosial penting yang menopang keberhasilan penyelesaian konflik di masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri tergolong cukup memadai secara kualitas, terutama pada aspek hubungan sosial dan kemampuan komunikasi Bhabinkamtibmas. Namun, secara kuantitas dan dukungan fasilitas masih terbatas, baik dalam hal jumlah personel, anggaran, maupun sarana pendukung teknis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelatihan, pengadaan fasilitas komunikasi, dan optimalisasi dukungan anggaran sangat diperlukan agar kebijakan Kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat didefinisikan sebagai kecenderungan, komitmen, dan respons individu atau kelompok pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan, termasuk sejauh mana mereka memiliki kemauan dan motivasi untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan George C. Edwards III (1984). Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan di Desa Bangsri umumnya menunjukkan komitmen yang baik, meskipun masih ditemukan kendala koordinasi di tingkat pelaksana. Disampaikan oleh Bhabinkamtibmas bahwa dalam beberapa kasus mediasi antar pedagang, (Laary et al., 2022) respons perangkat desa atau pengelola pasar tidak selalu cepat dan kooperatif, sehingga proses penyelesaian konflik sering terlambat dilakukan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Bhabinkamtibmas memiliki semangat dan empati yang tinggi, dukungan sikap dan kepedulian dari unsur pemerintah desa masih belum sepenuhnya optimal dalam menanggapi persoalan sosial di wilayahnya.

Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan di Desa Bangsri tergolong positif karena ditunjukkan melalui sikap empatik, netral, dan kolaboratif dari Bhabinkamtibmas serta sebagian besar perangkat desa. Namun, masih dibutuhkan peningkatan dalam hal proaktivitas dan koordinasi internal agar pelaksanaan kebijakan Kamtibmas dapat berjalan lebih konsisten, responsif, dan berkelanjutan. Sikap pelaksana

yang solid, terarah, dan berlandaskan nilai pelayanan publik akan menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas kebijakan keamanan di tingkat desa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pengorganisasian yang menetapkan pembagian tugas, jalur koordinasi, dan mekanisme pelaporan antarunit dalam suatu lembaga agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan terarah (Dahyar, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib Desa Bangsri, diungkapkan bahwa koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan keamanan telah dilakukan secara rutin, namun sering terhambat oleh prosedur administratif yang panjang. Dinyatakan bahwa sebelum mengambil tindakan tegas terhadap konflik pedagang, pihak desa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan kecamatan atau Polsek, yang sering menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian masalah. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun jalur pelaporan dan hierarki birokrasi sudah jelas, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat desa masih terbatas karena ketergantungan pada otorisasi di level yang lebih tinggi.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri dapat dikategorikan cukup efektif karena telah memiliki jalur pelaporan yang jelas dan pola koordinasi lintas sektor yang baik. Namun, masih diperlukan peningkatan fleksibilitas dan percepatan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lokal agar proses penyelesaian konflik tidak terhambat oleh birokrasi berlapis. Reformulasi mekanisme koordinasi dan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Bhabinkamtibmas serta pemerintah desa dapat memperkuat efektivitas sistem birokrasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah tersebut.

Pembahasan

Desa Bangsri di Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi, ditandai oleh aktivitas pertanian, industri kecil, dan perdagangan yang saling berkelindan. Keberadaan pasar tradisional, kios permanen, dan pedagang kaki lima menjadikan desa ini sebagai simpul interaksi ekonomi masyarakat lokal. Namun, intensitas aktivitas tersebut juga memunculkan berbagai bentuk perselisihan antar pedagang, mulai dari sengketa lapak hingga utang piutang, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam konteks ini, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat strategis dalam mendekripsi, mencegah, dan menangani konflik secara dini. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan Kamtibmas dalam merespons konflik pedagang di Desa Bangsri, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984) sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan kondusif.

Tabel 2. Temuan dan Analisis Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri

Faktor Implementasi	Temuan di Lapangan	Analisis dan Implikasi
1. Komunikasi	Komunikasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat telah berjalan baik melalui berbagai saluran formal (rapat, sosialisasi) dan informal (grup WhatsApp, tokoh masyarakat). Namun, masih terdapat kendala dalam kecepatan penyampaian informasi dan koordinasi antar pihak.	Efektivitas komunikasi perlu diperkuat melalui sistem dua arah yang lebih cepat dan transparan. Komunikasi yang responsif akan membantu mempercepat penyelesaian konflik pedagang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
2. Sumber Daya	Sumber daya manusia memiliki kualitas cukup baik, terutama dari sisi kemampuan komunikasi dan hubungan sosial Bhabinkamtibmas. Namun, jumlah personel terbatas, dukungan fasilitas seperti alat komunikasi dan ruang mediasi kurang memadai, serta anggaran operasional masih minim.	Keterbatasan kuantitas dan fasilitas berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Diperlukan peningkatan pelatihan, pengadaan sarana pendukung, dan optimalisasi anggaran agar kegiatan Kamtibmas berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	Bhabinkamtibmas dan perangkat desa menunjukkan sikap positif, empatik, netral, dan kolaboratif dalam menangani konflik antar pedagang. Namun, koordinasi internal belum selalu berjalan optimal karena sebagian perangkat desa kurang proaktif dalam menindaklanjuti laporan.	Sikap pelaksana yang terbuka dan kolaboratif mendukung keberhasilan implementasi, tetapi perlu peningkatan kesadaran kolektif agar setiap unsur pelaksana lebih proaktif dan konsisten. Disposisi yang kuat dan berlandaskan nilai pelayanan publik menjadi kunci keberlanjutan kebijakan Kamtibmas.
4. Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi sudah memiliki jalur pelaporan yang jelas dan koordinasi lintas sektor berjalan baik. Namun, masih terjadi tumpang tindih peran dan lambatnya pengambilan keputusan karena prosedur hierarkis yang panjang.	Struktur birokrasi perlu dibuat lebih fleksibel dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Bhabinkamtibmas dan pemerintah desa. Reformulasi mekanisme koordinasi ini akan mempercepat penanganan konflik dan memperkuat efektivitas sistem Kamtibmas di tingkat lokal.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Temuan dari literatur terkini memperkuat bahwa komunikasi merupakan fondasi utama efektivitas implementasi kebijakan Kamtibmas. Penelitian Oxholm & Glaser (2023) menegaskan bahwa bagaimana aparat memaknai komunikasi sebagai bagian inti pekerjaan menentukan kualitas hubungan mereka dengan masyarakat. Penjelasan ini memperluas pemahaman bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi menyentuh aspek kultural dalam organisasi kepolisian. Studi Aston et al., (2023) juga menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan interaksional, seperti sikap petugas, aksesibilitas, dan kontak personal, memainkan peran besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Temuan Dobson et al., (2025) bahkan menekankan efektivitas *"transparency statement"* sederhana yang dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan penerimaan publik terhadap aparat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai variabel teknis, tetapi sebagai instrumen sosial-psikologis yang membentuk legitimasi lembaga.

Dalam konteks Bangsri, teori tersebut tidak sekadar mengonfirmasi temuan lapangan, tetapi juga mengungkapkan adanya problem struktural yang lebih dalam. Meskipun Bhabinkamtibmas memiliki komunikasi interpersonal yang baik, keterlambatan respons dan

koordinasi antarunit menunjukkan adanya hambatan sistemik. Proses pelaporan yang berlapis menyebabkan informasi tidak mengalir secara cepat, sehingga mengurangi efektivitas penyelesaian konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi tidak sepenuhnya berada dalam kendali pelaksana, tetapi juga ditentukan oleh desain koordinasi antaraktor yang tidak fleksibel. Hambatan ini merupakan faktor *emergent* yang tidak dijelaskan secara detail oleh George C. Edwards III (1984), yang lebih menekankan kejelasan pesan daripada dinamika hubungan institusional.

Pada aspek sumber daya, teori Goggin et al., (1984), Grindle (2017) dan Pandey (2021) menekankan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan bukan hanya kecukupan sumber daya formal, tetapi juga kapasitas sosial seperti kepercayaan dan jaringan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemampuan sosial dan komunikasi Bhabinkamtibmas cukup baik, namun keterbatasan personel dan fasilitas pendukung menjadi kendala serius di Bangsri. Aparat sering kali harus memaksimalkan modal sosial dan hubungan informal untuk menutup kekurangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa teori George C. Edwards III (1984) yang melihat sumber daya sebagai faktor teknokratis belum sepenuhnya menangkap realitas lapangan yang menuntut adaptasi kontekstual. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi di Bangsri lebih banyak bergantung pada kemampuan aktor mengelola sumber daya non-material yang bersifat spontan dan berbasis hubungan sosial.

Dispositioni pelaksana kebijakan juga menjadi aspek penting dalam efektivitas implementasi Kamtibmas. Studi Hardianto & Bariun (2025), Laary et al., (2022) dan Sawir et al., (2023) menunjukkan bahwa sikap empatik, netral, dan kolaboratif aparat dapat memperkuat legitimasi dan stabilitas keamanan di tingkat lokal. Temuan serupa ditemukan di Bangsri, di mana Bhabinkamtibmas menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa disposisi positif tidak selalu menghasilkan respons cepat ketika perangkat desa tidak proaktif atau ketika koordinasi internal terhambat (Nurany et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa persoalan bukan terletak pada sikap pelaksana saja, tetapi pada ekosistem birokrasi yang tidak mampu mendukung inisiatif mereka. George C. Edwards III (1984) cenderung melihat disposisi sebagai faktor individual, tetapi temuan ini menunjukkan bahwa disposisi bersifat relasional dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pendukung.

Struktur birokrasi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan Kamtibmas. Temuan Affan (2022), Ramadhani et al., (2025) dan Salman (2022) menunjukkan bahwa struktur pelaporan kepolisian yang hierarkis sering kali memperlambat respons lapangan. Hal tersebut tercermin pula di Bangsri, di mana prosedur pengambilan keputusan yang berlapis menyebabkan keterlambatan penanganan konflik pedagang. Meskipun jalur koordinasi formal telah ditetapkan, pelaksana tidak memiliki fleksibilitas memadai untuk bertindak cepat. Analisis ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi bukan hanya hambatan administratif, tetapi juga hambatan kewenangan yang memengaruhi efektivitas tindakan di lapangan. Faktor ini kembali menunjukkan adanya dinamika emergent yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka George C. Edwards III (1984), yaitu kebutuhan akan desentralisasi kewenangan operasional.

Dengan menggabungkan temuan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terlihat bahwa implementasi kebijakan Kamtibmas di Bangsri tidak dapat dijelaskan secara utuh melalui pendekatan konfirmatif terhadap teori George C. Edwards III (1984). Terdapat faktor-faktor *emergent* seperti ketidakselarasan kapasitas antaraktor desa, ketergantungan pada modal sosial, keterbatasan teknologi komunikasi, serta kurangnya fleksibilitas birokrasi. Faktor-faktor ini muncul secara kontekstual dan hanya terlihat melalui analisis mendalam terhadap hubungan antaraktor di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak cukup dipahami sebagai hasil dari empat variabel klasik, tetapi sebagai proses adaptif yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan struktur lokal.

Akhirnya, analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi hubungan sosial antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih bergantung pada kemampuan mempercepat arus komunikasi, memperkuat dukungan sumber daya, meningkatkan koordinasi internal pemerintah desa, dan melakukan reformasi birokrasi yang lebih fleksibel. Dengan memperhatikan faktor-faktor *emergent* yang muncul dari dinamika lokal, efektivitas kebijakan Kamtibmas di masa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa adaptif para aktor dalam menavigasi keterbatasan struktural dan memanfaatkan kekuatan sosial yang sudah ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam membangun koordinasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat. Namun, masih ditemukan sejumlah kendala yang perlu diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Faktor komunikasi menjadi aspek paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi karena berperan sebagai jembatan koordinasi, penyampaian informasi, serta penguatan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran masih menghambat efektivitas kegiatan lapangan, sementara disposisi pelaksana yang positif perlu diiringi dengan tindakan yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang sudah jelas perlu disederhanakan agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan Kamtibmas di Desa Bangsri akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak dalam memperkuat komunikasi, meningkatkan kapasitas sumber daya, serta menciptakan birokrasi yang adaptif dan kolaboratif.

Implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1984), khususnya pada aspek komunikasi sebagai penentu utama keberhasilan kebijakan keamanan berbasis komunitas. Temuan ini juga memperluas pemahaman tentang implementasi kebijakan di tingkat lokal, dengan menekankan pentingnya adaptasi birokrasi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat desa. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Kamtibmas perlu difokuskan pada pelatihan resolusi konflik bagi Bhabinkamtibmas, penyediaan fasilitas mediasi di area pasar, serta alokasi anggaran yang mendukung kegiatan preventif.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyederhanakan struktur birokrasi dan mendesentralisasi kewenangan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan kontekstual.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Cakupan data hanya terbatas pada satu desa, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan kualitatif yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika kuantitatif seperti frekuensi konflik atau efektivitas intervensi secara statistik. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti LSM dan organisasi keagamaan belum dieksplorasi secara mendalam, padahal mereka berpotensi menjadi mitra strategis dalam menjaga Kamtibmas. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang lebih operasional meliputi pembentukan forum komunikasi pedagang dan aparat, pelatihan mediasi sosial, penyediaan posko Kamtibmas di pasar, integrasi sistem informasi konflik mikro, serta penyederhanaan SOP penanganan konflik agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

REFERENSI

- Affan, I. (2022). Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 153-168.
- Aguirre, K., & Muggah, R. (2018). Citizen security in Latin America: Facts and Figures. In *Strategic Papers* (Vol. 33, Issue April). Igarape Institute. <https://igarape.org.br/en/citizen-security-in-latin-america-facts-and-figures/>
- Aston, E. V., O'Neill, M., Hail, Y., & Wooff, A. (2023). Information sharing in community policing in Europe: Building public confidence. *European Journal of Criminology*, 20(4), 1349-1368. <https://doi.org/10.1177/14773708211037902>
- Dahyar, D. (2019). Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik. *Makassar: Leisyah*, 254. <https://id1lib.org/book/11116335/d0cafd>
- Dobson, K. S. H., Dittmann, A. G., & Yeager, D. S. (2025). A transparency statement improves trust in community-police interactions. *Nature Communications*, 16(1), 2285. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55709-6>
- George C. Edwards III. (1984). *Public Policy Implementation*. JAI Press.
- Goggin, M. L., Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1984). Implementation and Public Policy. *CrossRef Listing of Deleted DOIs*, 14(4). <https://doi.org/10.2307/3330197>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Hardianto, U., & Bariun, L. O. (2025). Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binaan pada Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3417-3430.
- Hogwood, B. W. (1995). Public Policy. *Public Administration*, 73(1), 59-73. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1995.tb00817.x>
- Laary, Y., Tulusan, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60-67.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A method sourcebook. *CA, US: Sage Publications*.
- Nurany, F., Agustina, L. D., Kirana, A. P., Winar, D., Renata, I., Naufal, A., & Ismah, R. D. (2024). Urgensi Keamanan Dan Pertahanan: Implementasi Kebijakan Kamtibmas Pada

- Tempat Wisata Desa Miru. *Publiciana*, 17(02), 159–167.
- Nurany, F., Yuliasari, V., Putri, M., Syecha, N. R., Muhammad, A. A., & Dean, A. (2023). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Jatikalang Krian. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 5(2), 30. <https://doi.org/10.31602/jt.v5i2.12038>
- Oxholm, P. D., & Glaser, J. (2023). Goals and outcomes of police officer communication: Evidence from in-depth interviews. *Group Processes and Intergroup Relations*, 26(4), 875–890. <https://doi.org/10.1177/13684302221121585>
- Pandey, S. K. (2021). The psychological process view of bureaucratic red tape. In *Research Handbook on HRM in the Public Sector: Elgar Handbooks in Public Administration and Management* (pp. 260–275). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789906622.00028>
- Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., M. H. S. (2023). *Penguatan Bhabinkamtibmas*. Kaizen Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Penguatan_Bhabinkamtibmas/Y6v6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Rahanra, F., & Kasihiuw, R. (2024). Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Polsek Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 1557–1563. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.438>
- Ramadhani, B., Putra, B. M., Purnawan, H., & Darmawi, E. (2025). The Role Of Bhabinkamtibmas In Improving The Positive Image Of The Police Institution Of The Republic Of Indonesia (Study In Pagar Jati District, Central Bengkulu Regency). *JURNAL ISIP VOICE : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 51–60. <https://doi.org/10.58222/jiv.v4i1.1321>
- Rogers EM. dan Shoemakers F. (1987). *Comunication of Inovation* (Terjemahan). Usana Offset Printing.
- Salman, A. Z. (2022). Analisis Kompetensi Bhabinkamtibmas Dalam Memberikan Pelayanan Keamanan Kepada Warga Masyarakat Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(1), 960–973. <https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/view/349%0Ahttps://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/download/349/267>
- Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and ...*, 5(1), 111–121.
- Syahrum, M. (2024). Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235–244.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4). <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahyudi, F., & Wicaksono, I. (2023). Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) dalam Kamtibmas di Desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.126>